

ANALISIS PEMETAAN KINERJA KEUANGAN KABUPATEN/KOTA PROPINSI JAMBI

Selamet Rahmadi

ABSTRAK

Peningkatan penerimaan, khususnya PAD harus terus diupayakan. Peningkatan penerimaan PAD di propinsi/kabupaten/kota akan sangat menentukan kelangsungan pembangunan, menentukan tingkat ketergantungan terhadap pemerintahan yang lebih tinggi. Penerimaan PAD, digunakan propinsi/kabupaten/kota untuk membiayai belanja yaitu : belanja modal, belanja operasi dan belanja tak terduga. Kinerja PAD dalam membiayai belanja dapat diukur dengan menggunakan pendekatan share dan growth dan sekaligus menentukan bagaimana kemampuannya (pemetaan keuangan daerah).

Selama tahun 2009-2012, pemetaan kinerja keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jambi, khususnya PAD dalam membiayai total belanja ternyata ada tujuh (7) Kabupaten/kota yang dalam kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara empat (4) kabupaten kinerja keuangannya masuk dalam kondisi paling buruk yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Pemetaan kinerja keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jambi yaitu PAD dalam membiayai belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga ada tujuh (7) Kabupaten/kota yang dalam kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara empat (4) kabupaten kinerja keuangannya masuk dalam kondisi paling buruk yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

*** Key Word : PAD, Total Belanja**

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pemberlakuan otonomi daerah tahun 2001, membuat hubungan pemerintah pusat- daerah menjadi lebih aspiratif dan mengedepankan kepentingan masyarakat, baik tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Otonomi daerah yang diberikan kepada daerah pada dasarnya mengandung tiga aspek : *Pertama*, sebagai pelimpahan tanggung jawab pusat kepada daerah dalam hal pelaksana dan pengambil keputusan administrasi, *Kedua*, sebagai delegasi dimana daerah bertindak atas nama pemerintah pusat dan *Ketiga*, sebagai devolusi mengambil dan memutuskan sesuatu di daerah.

Total penerimaan Propinsi Jambi rata-rata meningkat 15,96 % selama tahun 2009-2012. Peningkatan disebabkan meningkatnya total penerimaan pada kabupaten/kota. Total penerimaan Kota Sungai Penuh merupakan peningkatan rata-rata terbesar yaitu 127,61 % dan rata-rata terendah Kabupaten Tanjungjabung Timur 8,90 %. Peningkatan total penerimaan sebagai akibat meningkatnya sumber-sumber penerimaan. Rata-rata peningkatan terbesar penerimaan PAD adalah Kota Sungai Penuh 210,56 % dan terendah adalah Kabupaten Tebo 5,12 %.

Rata-rata peningkatan terbesar penerimaan dana perimbangan adalah Kota Sungai Penuh yaitu 129,64 % dan Kabupaten Tanjungjabung Timur adalah yang terendah 11,45 %. Sementara pada sumber penerimaan lain-lain yang sah, 8 kabupaten/kota penerimaannya terus meningkat dan 3 yang mengalami penurunan yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Tanjungjabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi.

Kemampuan meningkatkan total penerimaan diharapkan dapat mendorong peningkatan pelayanan pada masyarakat, mendorong peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat dimasing-masing kabupaten/kota. Total belanja Propinsi Jambi rata-rata meningkat 11,40 % dan kabupaten/kota dengan rata - rata peningkatan lebih besar dari rata-rata peningkatan total belanja Propinsi Jambi yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh dan sisanya memiliki rata-rata peningkatan di bawah Propinsi Jambi.

Total belanja dialokasikan untuk belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga. Belanja operasional, semua kabupaten/kota memiliki rata-rata peningkatan lebih besar dari peningkatan belanja Propinsi Jambi yaitu 1,74 % dan Kota Sungai Penuh memiliki peningkatan paling besar 99,46 % sementara Kabupaten Tebo adalah yang terendah yaitu 2,31 %. Belanja modal Propinsi Jambi rata-rata meningkat 5,29 % dan Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata peningkatan terbesar yaitu 171,27 % sementara penurunan terbesar adalah Kabupaten Sarolangun yaitu 26,74 %. Belanja tak terduga, kabupaten/kota dengan rata-rata peningkatan terbesar adalah Kabupaten Bungo yaitu 638,70 % dan yang mengalami penurunan terbesar adalah Kabupaten Muaro Jambi sementara untuk Propinsi Jambi sebesar 19,33 %.

Berdasarkan fenomena diatas memperlihatkan, peningkatan penerimaan mendorong terjadinya peningkatan belanja daerah. Hubungan positif/searah bukan berarti sumber-sumber penerimaan daerah, khususnya PAD memiliki kemampuan besar dalam membiayai total belanja daerah (belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga).

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan bagaimana kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Propinsi Jambi dalam bentuk pertanyaan :

1. Bagaimana kondisi pemetaan kinerja PAD dalam membiayai total belanja daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jambi.
2. Bagaimana kondisi pemetaan kinerja PAD dalam membiayai belanja operasional dan belanja modal pada kabupaten/kota di Propinsi Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kondisi pemetaan kinerja PAD dalam membiayai total belanja daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jambi.
2. Mengetahui kondisi pemetaan kinerja PAD dalam membiayai belanja operasional dan belanja modal pada kabupaten/kota di Propinsi Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal

Otonomi secara administrasi publik daerah disebut sebagai *local self government* artinya memerintah sendiri. Prawirosetoto (2002). Khusaini (2006) memberi arti daerah otonom sebagai *local state government* yang berarti pemerintah di daerah merupakan kepanjangan dari pemerintah pusat. UU No. 32 Tahun 2004 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006, menjelaskan otonomi daerah merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

2.2. Keuangan Daerah

Kepmendagri No. 29 tahun 2002 dan PP No. 58 tahun 2005, menjelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Sementara Mamesa (1995) dalam Halim (2009) mengartikan : keuangan daerah adalah semua hak dan

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan berlaku.

2.3. Pengeluaran/Belanja Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (propinsi/kabupaten/kota) setiap tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan pengeluaran tersebut dalam rangka mempercepat pembangunan dan pelayanan pada masyarakat. Pengeluaran daerah tergambar melalui besaran alokasi dana yang di anggarkan pada masing-masing sektor dalam perekonomian, semakin besar alokasi dana pada masing-masing sektor akan mendorong sektor tersebut untuk tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi besar pada perekonomian (PDRB).

2.4. Hubungan PAD Dengan Belanja Daerah

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor produksi yang digunakan dan terdiri dari : upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta di tambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Santosa (2005) menjelaskan, bahwa PDRB dan pendapatan asli daerah (PAD) memiliki hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Adi, 2009).

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Yang Digunakan

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mencari, menggumpulkan informasi/data dari laporan-laporan, penelitian terdahulu dan buku-buku teks, baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan. (Nazir, 1998).

3.2. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) selama tahun 2009-2012. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, sudah dikumpulkan dari sumber lain atau pihak lain dan berhubungan dengan masalah yang diteliti. (Teguh, 2001). Data yang digunakan adalah : realisasi total penerimaan daerah, realisasi total belanja daerah, realisasi belanja operasional, belanja modal kabupaten/kota dan Propinsi Jambi.

3.3. Metode Analisis Data

1. Pengukuran *share*

Pengukuran nilai *share* dilakukan dengan menentukan rasio persentase antara kemampuan penerimaan PAD terhadap total penerimaan, total belanja daerah, belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga.

2.(Perkembangan)Growth

(perkembangan) digunakan untuk mengukur persentase peningkatan keuangan kabupaten/kota dan Propinsi Jambi. Perkembangan keuangan daerah merupakan cerminan peningkatan kapasitas potensial keuangan kabupaten/kota dan Propinsi Jambi. Perkembangan yang diukur adalah penerimaan PAD, total belanja, belanja operasional dan belanja modal.

3. Metode Kuadran

Metode ini digunakan untuk melihat peta kemampuan keuangan daerah. Peta kemampuan keuangan kabupaten/kota dapat dilihat dari nilai *share* dan *growth* (perkembangan) kabupaten/kota di Propinsi Jambi terhadap nilai *share* dan *growth* (perkembangan) Propinsi Jambi. Kondisi keuangan kabupaten/kota pada metode kuadran ditentukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut : Bappenas dalam Setiaji dan Adi (2007).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Share PAD Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Kemampuan atau kinerja keuangan daerah pada dasarnya dapat diukur dengan menentukan besaran *share* PAD terhadap total penerimaan daerah. PAD kabupaten/kota Propinsi Jambi secara umum mengalami peningkatan, dimana peningkatan yang terjadi berbeda-beda disetiap kabupaten/kota. Perbedaan terjadi, karena keragaman dalam penguasaan sumberdaya yaitu sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. Perbedaan peningkatan PAD kabupaten/kota Propinsi Jambi mengakibatkan besaran *share* selama tahun 2009-2012 juga berbeda-beda terhadap total penerimaan.

Rata-rata *share* PAD kabupaten/kota secara keseluruhan terhadap total penerimaan kabupaten/kota Propinsi Jambi sebesar 4,75 % dan lebih rendah di banding rata-rata *share* PAD Propinsi Jambi yaitu 42,70 %. Rata-rata *share* PAD Kota Jambi yaitu 8,79 % merupakan yang terbesar.

Tingginya *share* PAD Kota Jambi disebabkan Kota Jambi memiliki keunggulan sumberdaya manusia dan menjadi pusat perekonomian serta pemerintahan Propinsi Jambi. Kabupaten dengan rata-rata *share* PAD terendah adalah Kota Sungai Penuh yaitu 2,37 %. *Share* yang rendah disebabkan Kota Sungai Penuh merupakan daerah baru dimekarkan

Tabel. 4.1. Rata - Rata *Share* PAD Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jambi Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	PAD
Kota Jambi	8,79
Kabupaten Bungo	7,96
Kabupaten Kerinci	5,58
Kabupaten Tanjungjabung Barat	3,72
Kabupaten Tanjungjabung Timur	3,33
Kabupaten Tebo	3,45
Kota Sungai Penuh	2,37
Kabupaten Merangin	5,12
Kabupaten Sarolangun	4,24
Kabupaten Muaro Jambi	3,24
Kabupaten Batanghari	4,45
Rata-rata <i>share</i> Kabupaten/Kota	4,75
Rata-rata <i>share</i> Propinsi Jambi	42,70

Sumber : data diolah

4.2. *Growth* (Perkembangan) PAD Dan Total Belanja Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Tabel.4.2. Rata-Rata *Growth* (Perkembangan) PAD Kabupaten/Kota Propinsi Jambi tahun 2009-2012 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	PAD
Kota Jambi	92,69
Kabupaten Bungo	21,59
Kabupaten Kerinci	30,62
Kabupaten Tanjungjabung Barat	43,37
Kabupaten Tanjungjabung Timur	13,66
Kabupaten Tebo	5,12
Kota Sungai Penuh	210,56
Kabupaten Merangin	23,82
Kabupaten Sarolangun	28,98
Kabupaten Muaro Jambi	40,89
Kabupaten Batanghari	41,02
Rata-Rata <i>Growth</i> Kabupaten/Kota	50,21
Rata-Rata <i>Growth</i> Propinsi Jambi	24,59

Sumber : data diolah

Rata-rata peningkatan PAD kabupaten/kota lebih besar dari peningkatan rata-rata PAD Propinsi Jambi terdapat pada tujuh (7) kabupaten/kota yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari dengan peningkatan terbesar terdapat pada Kota Sungai Penuh sebesar 210,56 %. Rata-rata peningkatan PAD kabupaten/kota lebih kecil dari rata-rata peningkatan PAD Propinsi Jambi terdapat pada empat (4) kabupaten yaitu : Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin dengan peningkatan terendah adalah Kabupaten Tebo sebesar 5,12 %.

Peningkatan penerimaan PAD kabupaten/kota dan Propinsi Jambi memberi dampak pada peningkatan total belanja. Total belanja Propinsi Jambi rata-rata meningkat 11,40 % dan lebih rendah dibanding rata-rata peningkatan total belanja kabupaten/kota secara keseluruhan yaitu 20,14 %. Rata-rata total belanja kabupaten/kota meningkat lebih besar dari peningkatan rata-rata Propinsi Jambi yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci dan paling besar adalah Kota Sungai Penuh sebesar 119,83 %. Kabupaten/kota dengan rata-rata peningkatan total belanja lebih kecil dari rata-rata total belanja Propinsi Jambi adalah :

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi , Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo. Kabupaten Tanjungjabung Barat dan Kabupaten Tanjungjabung Timur adalah merupakan kabupaten/kota yang memiliki nilai rata-rata peningkatan paling rendah di Propinsi Jambi. Rata-rata belanja modal Propinsi Jambi meningkat 5,29 % dan lebih rendah dibanding rata-rata peningkatan seluruh belanja modal kabupaten/kota yaitu 22,80 %. Kabupaten/kota yang memiliki rata-rata peningkatan lebih besar dari rata-rata peningkatan Propinsi Jambi yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan Kota Sungai Penuh. Kota Sungai Penuh memiliki rata-rata peningkatan belanja modal paling besar di banding kabupaten/kota lainnya yaitu 171,27 %. Kabupaten/kota dengan rata-rata belanja modal menurun adalah : Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi. Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten yang memiliki nilai rata-rata belanja modal yang mengalami penurunan terbesar yaitu 26,74 %.

Tabel.4.3. Rata – Rata *Growth* (Perkembangan) Total Belanja Kabupaten/Kota Propinsi Jambi tahun 2009-2012 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Total Belanja Daerah
Kota Jambi	19,13	23,51	122,59	18,64
Kabupaten Bungo	14,20	-13,09	638,70	6,88
Kabupaten Kerinci	11,83	56,82	0	19,46
Kabupaten Tanjungjabung Barat	20,95	-11,20	16,62	4,71
Kabupaten Tanjungjabung Timur	14,86	-2,37	374,34	4,71
Kabupaten Tebo	2,31	27,39	-28,61	5,23
Kota Sungai Penuh	99,46	171,27	-31,68	119,83
Kabupaten Merangin	13,24	13,99	-12,42	12,43
Kabupaten Sarolangun	49,00	-26,74	333,33	8,73
Kabupaten Muaro Jambi	19,08	-6,82	-45,39	10,22
Kabupaten Batanghari	10,91	17,98	35,15	10,70
Rata-rata <i>Growth</i> Kabupaten/Kota	25,00	22,80	127,51	20,14
Rata-rata <i>Growth</i> Propinsi Jambi	1,74	5,29	19,33	11,40

Sumber : data diolah

Rata-rata belanja tak terduga Propinsi Jambi meningkat 19,33 % dan lebih rendah dibanding rata-rata peningkatan seluruh belanja tak terduga kabupaten/kota yaitu 127,51 %. Kabupaten/kota dengan rata-rata peningkatan belanja tak terduga lebih besar dari rata-rata peningkatan Propinsi Jambi adalah : Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun. Kabupaten Bungo adalah kabupaten yang memiliki nilai rata-rata peningkatan terbesar yaitu 638,70 %. Kabupaten/kota dengan rata-rata belanja tak terduga menurun adalah : Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Kabupaten Muaro Jambi merupakan kabupaten yang memiliki nilai rata-rata belanja tak terduga yang mengalami penurunan terbesar yaitu 45,39 %.

4.3.Pemetaan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jambi

Peningkatan penerimaan daerah terutama penerimaan PAD harus terus diupayakan. Peningkatan penerimaan menuntut kemampuan kabupaten/kota berinovasi menggali sumber penerimaan potensial menjadi penerimaan sesungguhnya. Keberhasilan menggali sumber penerimaan potensial memberi dampak pada ketersediaan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Penerimaan PAD kabupaten/kota Propinsi Jambi terus meningkat setiap tahun, tetapi belum mampu menjadikan PAD kabupaten/kota menjadi sumber utama bagi pembiayaan pembangunan, khususnya untuk membiayai belanja operasional dan belanja modal apalagi untuk total belanja

Rata-rata *share* PAD terhadap total belanja kabupaten/kota Propinsi Jambi selama tiga (3) tahun secara keseluruhan 4,84 % atau dibawah *share* Propinsi Jambi 45,59 %. Kondisi ini menggambarkan kemampuan PAD kabupaten/kota rendah dalam membiayai total belanja daerah. Kota Jambi memiliki *share* PAD terbesar terhadap total belanja yaitu 8,96 % dan Kota Sungai Penuh memiliki *share* terendah 2,77 %.

Rata-rata *share* PAD terhadap belanja operasional kabupaten/kota secara keseluruhan 6,76 % atau lebih rendah dibanding rata-rata *share* Propinsi Jambi 83,01 %. Rata-rata *share* PAD terhadap belanja modal secara keseluruhan untuk kabupaten/kota 20,78 % dan lebih rendah dari rata-rata *share* Propinsi Jambi 151,75 %. Rata-rata *share* PAD terhadap belanja tak terduga secara keseluruhan untuk kabupaten/kota 3.157,30 % atau lebih rendah dibanding rata-rata *share* Propinsi Jambi yaitu 31.102,43 %.

Tabel. 4.4. Rata - Rata Share PAD Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Jambi Tahun 2009-2012 (dalam persen)

Kabupaten/Kota	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Total Belanja Daerah
Kota Jambi	10,71	56,79	9,42	8,96
Kabupaten Bungo	10,66	35,16	28,68	8,08
Kabupaten Kerinci	6,75	24,83	683,19	5,24
Kabupaten Tanjungjabung Barat	6,70	11,13	8.560,72	4,11
Kabupaten Tanjungjabung Timur	5,82	7,49	5.204,52	3,26
Kabupaten Tebo	5,08	11,92	1.395,23	3,50
Kota Sungai Penuh	4,14	8,81	2.328,56	2,77
Kabupaten Merangin	6,58	20,67	1.923,65	4,96
Kabupaten Sarolangun	8,16	10,30	1.053,33	4,19
Kabupaten Muaro Jambi	4,81	12,00	10.185,23	3,40
Kabupaten Batanghari	4,89	29,49	3.357,75	4,74
Rata-Rata Share Kabupaten/Kota	6,76	20,78	3.157,30	4,84
Propinsi Jambi	83,01	151,75	31.102,43	45,59

Sumber : data diolah

Hasil perhitungan memperlihatkan, seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jambi rata-rata *share* PAD terhadap total belanja, belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga lebih rendah dibanding rata-rata *share* PAD terhadap total belanja, belanja operasional, belanja modal dan belanja tak terduga Propinsi Jambi dan rata-rata *growth* PAD kabupaten/kota lebih tinggi di banding nilai rata-rata *growth* Propinsi Jambi.

Hasil perhitungan diatas juga dapat digunakan dalam penentuan posisi keuangan di masing-masing kabupaten/kota (pemetaan keuangannya). Hasil pemetaan memperlihatkan, terdapat tujuh (7) kabupaten/kota yang memiliki kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Kabupaten/kota yang memiliki kondisi paling buruk terdapat pada empat (4) kabupaten yaitu :

Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Merangin. Melihat kondisi yang ditemui, maka kinerja keuangan Kabupaten/kota di Propinsi Jambi memperlihatkan bahwa : masih lemahnya upaya mengembangkan potensi lokal menjadi sumber penerimaan, khususnya dari PAD, masih jauh dari harapan untuk dapat menjadikan PAD sebagai sumber utama pembiayaan belanja daerah dan mengurangi ketergantungan *fiskal* dari pemerintah yang lebih tinggi.

Tabel. 4.5. Kondisi Peta Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Jambi Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota	Share PAD Terhadap				Growth PAD	Kondisi
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Total Belanja Daerah		
Kota Jambi	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal
Kabupaten Bungo	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	paling buruk
Kabupaten Kerinci	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal
Kabupaten Tanjungjabung Barat	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal
Kabupaten Tanjungjabung Timur	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	paling buruk
Kabupaten Tebo	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	paling buruk
Kota Sungai Penuh	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal
Kabupaten Merangin	rendah	rendah	rendah	rendah	rendah	paling buruk
Kabupaten Sarolangun	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal
Kabupaten Muaro Jambi	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal
Kabupaten Batanghari	rendah	rendah	rendah	rendah	tinggi	belum ideal

Sumber : data diolah

5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemetaan kinerja keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jambi yaitu PAD dalam membiayai total belanja ada tujuh (7) Kabupaten/kota yang dalam kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara empat (4) kabupaten kinerja keuangannya masuk dalam kondisi paling buruk yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

2. Pemetaan kinerja keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jambi yaitu PAD dalam membiayai belanja operasional dan belanja modal ada tujuh (7) Kabupaten/kota yang dalam kondisi belum ideal yaitu : Kota Jambi, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kota Sungai Penuh, Kabupaten sarolangun, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Batanghari. Sementara empat (4) kabupaten kinerja keuangannya masuk dalam kondisi paling buruk yaitu : Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin.

5.2 Saran

1. Kemampuan yang masih rendah PAD sebagai sumber utama pembiayaan, baik total belanja, belanja operasional dan belanja modal, maka hendaknya pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jambi harus lebih mampu meningkatkan kemampuan keuangannya, dengan mengoptimalkan upaya pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia potensial sebagai sumber penerimaan PAD. Upaya dapat dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber penerimaan PAD, mengingat kabupaten/kota masih memungkinkan untuk ditingkatkan PADnya.

2. Mengingat kinerja PAD kabupaten/kota yang rendah dan masih memungkinkan ditingkatkan, maka dimasa datang hendaknya kabupaten/kota di Propinsi Jambi lebih mengarahkan belanjanya lebih besar pada belanja modal dari pada belanja operasional. Hal ini mengingat belanja operasional bukanlah belanja yang memberi dampak langsung pada peningkatan aktivitas perekonomian daerah dan masyarakat tetapi lebih bersifat administratif sementara belanja modal merupakan kegiatan investasi pemerintah yang mampu memberi pengaruh langsung pada aktivitas perekonomian daerah (PDRB) dan kesejahteraan masyarakat dari output yang dihasilkan. Kondisi ini akhirnya nanti diharapkan mampu meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah yaitu PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo, Hari, 2009, Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No.1.
- Dwirandra, 2008, Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota di Propinsi Bali Tahun 2002 – 2006, Jurnal Ilmiah, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Udayana, Denpasar.
- Elmi, Bachrul, 2002, Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi Di Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Haeruman, 2000, Berbagai Kebijakan Peningkatan PAD, PAU UI, Jakarta.
- Halim, Abdul, 2001, Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul Dan Damayanti, Theresia, 2009, Pengelolaan Keuangan Daerah, Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Khusaini, Muhamad, (2006), Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah, Malang : BPFE Unbraw.
- Mahi, Raksaka, 2005, Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.VI NO.1. Juli.
- Mahmudi, 2007, Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, STIE YKPN, Yogyakarta.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1994, Ekonomi Publik, BPFE, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi Dan keuangan Daerah, BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2008, Akuntansi sektor Publik, Andi, Yogyakarta.
- Nazir, M, 1998, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Pambudi, Prio, Edi Dan Astuti, Sri, Esther, 2011, Peranan Pengeluaran Pemerintah Dalam Stabilitas Keuangan Daerah, Jurnal, Manajemen Usahawan Indonesia, Vol.40 No.2.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Depdagri Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Belanja Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Prakosa, Kesit, Bambang, 2004, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah : Studi Empirik Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dan DIY, JAAI, Vol 08 No.2.
- Prawirosetoto, Yuwono. FX, 2002, Desentralisasi Fiskal Di Indonesia, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Jakarta.
- Ritonga, Irwan Taufiq, 2009, Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan daerah Di Indonesia, Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Saad, Ilyas, 2003, Implementasi Otonomi Daerah Sudah Mengarah Pada Distorsi Dan High Cost Economy, Smeru Working Paper.
- Santosa, Purbayu. Budi, 2005, Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri, Jurnal Dinamika Pembangunan, Vol.2, No.1, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang.
- Setiaji, Wirawan Dan Adi, Hari, Priyo, 2007, Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali), Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Suparmoko, 2001, Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu, 2001, Dasar- Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara, Bina Aksara, Jakarta.
- Teguh, M, 2001, Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Dan 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah Dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik ; Teori Dan Proses, Edisi Revisi, Buku Kita, Jakarta.